

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Chainur Arrasjid. (2018). *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht. (1960). *Rangkaian Sari Kuliah Perdana Hukum Pidana 1*. Bandung: Universitas.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Frank E. Hagan. (2015). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Prenada Media.
- H. A. Zainal Abidin Farid. (2014). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernold Ferry Makawimbang, (2015), "Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", Yogyakarta Thafa Media,
- IGM Nurjana. (2010). *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi ; Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 2014, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irwansyah, & Ahsan Yunus. (2020). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.

- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kristian, & Yopi Gunawan. (2018). *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marwan Effendy. (2012). *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Mispansyah, & Amir Ilyas. (2016). *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan yurisprudensi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno, (1983), "Azas-Azas Hukum Pidana", Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Djafar Saidi, & Eka Merdekawati Djafar. (2021). *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Buku Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pradhita Rika Nagara. (2014). *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- R. Wiyono. (2006). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (2007). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.

Teguh Pudjo Mulyono. (2006). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE.

Tisadini dan Abd Shomad. (2019). *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana

Yenti Garnasih. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

JURNAL

Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap Dan/Atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara*, *Jurnal Hukum dan Kenotarian* Volume 6 Nomor 2 mei 2022.

Erman Rajagukguk, (2006). "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara", *Makalah disampaikan pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi"*, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta, 26 Juli 2006.

Ichsan Ansari. (2021, Desember). *Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan)*. *Jurnal Unes Law Review*, Volume 4.

Ni Luh Wayan Korin Agustini, Cok Istri Anom Pelayun dan Dewa Gede Rudy, 2017 "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin dalam Kredit Fiktif", *Kertha Semaya*, Volume 5, Nomor 1.

Suci Sulistiawati, Elsa Rina Maya Toule, dan Margie Gladies Sopacua, 2022, *Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank*, *Jurnal Tatohi*, Volume 2 nomor 5 juli 2022.

Zainal Azikin, Lalu Wira Pria Suhartana dan Usman, 2019, *Aspek Pertanggungjawaban keuangan Negara Dalam BUMN*, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 4 No. 2, Desember 2019.

SKRIPSI

Fajrina Madanie Basuki. (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Nasabah Kartu kredit Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan No. 97/Pid.Sus TPK/PN.Mks)*. Makassar: Universitas Bosowa.

Indra Saputra Taslim HS. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.SBY)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

TESIS

Elmarianti. (2022). *Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Rafno. (2019). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)*. Jambi: Universitas Batanghari.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2021/PN Mks.